

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Arus globalisasi yang tengah melanda dunia dewasa ini pada akhirnya merupakan realitas interaksi antar bangsa yang tak terhindarkan. Sebagai akibat begitu pesatnya revolusi komunikasi, siapa saja dimuka bumi bisa mengklaim diri sebagai “ warga dunia”, sehingga batas-batas fisik antar negarapun menjadi tidak begitu penting lagi. Sementara itu dibidang politik, demokrasi dan demokratisasi telah pula menjadi bagian arus globalisasi yang melanda dunia. Format politik yang cenderung tertutup dan pemerintahan otoritarian dianggap tidak lagi bisa menjawab berbagai tantangan dan tuntutan perubahan baik yang bersifat domestik maupun global.¹

Salah satu ”produk” gelombang reformasi yang mengemuka sejak 1997 adalah undang-undang NO 22 Tahun 1999 yang kemudian mengalami pergantian dengan undang-undang NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah atau yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.² Otonomi Daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari pusat Kepada Daerah untuk dapat mengatur daerahnya sendiri. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan peluang untuk mewujudkan aspirasi daerah yaitu keinginan untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui pilkada langsung.

¹ Syamsuddin Haris “ *MENGGUGAT PEMILIHAN UMUM ORDE BARU*” Hlm 4-5

² Irtanto “ *DINAMIKA POLITIK LOKAL ERA OTONOMI DAERAH* “ Hlm 1

Sistem demokrasi langsung membuka kemungkinan bagi semua warganegara dari semua latar belakang untuk ikut serta dalam perebutan kekuasaan. Terlebih ketika aturan tentang desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah diberlakukan. Kesempatan untuk ikut laga tanding dalam perebutan kekuasaan baik di level lokal maupun nasional kian terbuka bagi siapa saja. Namun, di tengah euforia kebebasan itu, muncul fenomena yang bisa jadi adalah anomali dari sistem demokrasi langsung, yakni fenomena politik dinasti dan maraknya kasus korupsi di daerah hingga penyalahgunaan kekuasaan dari kepala Daerah.

Politik Dinasti di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan, padahal pada prakteknya Politik Dinasti secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Politik Dinasti tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokratis-liberal. Adanya hubungan kedekatan antara pemimpin dengan rakyatnya sehingga pemimpin mudah dalam membentuk politik persuasive melalui gelontoran uang hingga ke pelosok. Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, politisasi birokrat maupun sosialisasi tokoh informal masyarakat menjadi bagian intimitas yang bertindak sebagai agen intermediasi dalam memenangkan dan melanggengkan kekuasaan famili politik.

Menurut Ari Dwipayana dalam Mahkamah Konstitusi ada beberapa hal yang mengakibatkan munculnya politik dinasti adalah :

- ❖ Adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan.
- ❖ Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
- ❖ Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi.
- ❖ Adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya Korupsi.³

Dengan adanya praktek politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tetapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang berkompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Disamping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasi karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

³ A.G.N Ari Dwipayana trend politik kekerabatan ini sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakti berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit sistem dalam menimbang prestasi. Menurutnya kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama tetapi menggunakan strategi baru.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS POLITIK DINASTI DI KABUPATEN MALAKA**”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahnya “**Apakah kabupaten Malaka menerapkan sistem politik Dinasti**”?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis politik Dinasti Di Kabupaten Malaka

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis Pola Perekrutmen Pejabat Publik bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan.

B. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat member masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Malaka Dalam melakukan perekrutmen pejabat publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip merit system.